

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra PhD, MBA, Akt. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Haruman, Tendi, dan Sri Rahayu. 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*, Edisi Kedua, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kusnadi. 1999. *Ekonomi Koperasi*, Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Banjarmasin.

Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Keppres Nomor 09 Tahun 2004 *tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.*

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 *tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Kota Pariaman.*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 *tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 *tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 *tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 4.*

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 *tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 *tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 *tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 *tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 *tentang Rencana Kerja Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 *tentang Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga.*

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 *tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.*